

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN
OBAT JENIS TRIHEXYPHENIDYL
(STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 24/PID.SUS/2024/PN SMN DAN
PUTUSAN NOMOR 288/PID.SUS/2024/PN YYK)**

Natasya Maharani¹, Niken Wahyuning Retno Mumpuni²

INTISARI

Peredaran gelap obat-obatan jenis Trihexyphenidyl menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana karena dampaknya yang merugikan kesehatan masyarakat dan menimbulkan potensi penyalahgunaan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur mengenai pengedaran obat tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku maupun masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran obat jenis Trihexyphenidyl belum secara spesifik tercantum dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan diatur dalam ketentuan mengenai obat keras. Pertimbangan hakim dalam putusan lebih banyak menekankan aspek keadilan dan efek jera, dengan menyesuaikan antara perbuatan terdakwa dan dampaknya. Akibat hukum bagi pelaku adalah pidana penjara dan denda, sedangkan bagi masyarakat terdapat risiko meningkatnya penyalahgunaan jika pengawasan tidak diperketat.

Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah segera melakukan pembaruan regulasi dengan memasukkan jenis obat seperti Trihexyphenidyl ke dalam pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan distribusi obat, serta meningkatkan edukasi hukum dan kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pengedaran Obat, Trihexyphenidyl

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Juridical Analysis of the Criminal Act of Distributing Trihexyphenidyl (Case Study: Decision Number 24/Pid.Sus/2024/PN Smn and Decision Number 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk)

Natasya Maharani³, Niken Wahyuning Retno Mumpuni⁴

ABSTRACT

The illicit distribution of Trihexyphenidyl has become a serious problem in criminal law enforcement due to its harmful impact on public health and its potential for abuse. The main issues in this research are how Indonesian positive law regulates the distribution of this drug, how judges consider and decide related cases, and what legal consequences arise for both offenders and society.

This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected from primary legal sources in the form of legislation and court decisions, as well as secondary legal materials such as literature, journals, and relevant doctrines, which were then analyzed qualitatively.

The results indicate that the regulation of Trihexyphenidyl distribution is not specifically stipulated in the Narcotics Law but is instead governed under provisions on restricted drugs. Judges' considerations in their rulings generally emphasize justice and deterrent effects, aligning offenders' actions with their consequences. The legal consequences for offenders include imprisonment and fines, while for society there is a growing risk of abuse if supervision is not strengthened.

This research suggests that the government should reform regulations by explicitly including drugs such as Trihexyphenidyl under stricter provisions, reinforce supervision of drug distribution, and enhance legal and health education to prevent abuse.

Keywords: Criminal Law, Drug Distribution, Trihexyphenidyl

³ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

⁴ Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA